

**KEPEMIMPINAN DALAM PARTAI DEMOKRAT
PERSPEKTIF POLITIK ISLAM**

SKRIPSI

**OLEH :
ACHMAD ZUBAIDI
NIM : CO23 04 048**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA
2009**

**KEPEMIMPINAN DALAM PARTAI DEMOKRAT
PERSPEKTIF POLITIK ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 008	No REG : S-2009/SS/008
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

SJ

Oleh :
ACHMAD ZUBAIDI
NIM: C023 04 048

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA
2009**

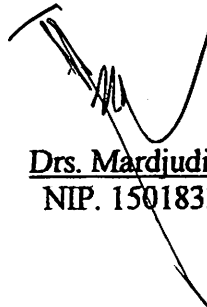
Gadjah Mada

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Zubaidi (NIM. CO 23 04 048) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Januari 2009

Pembimbing,



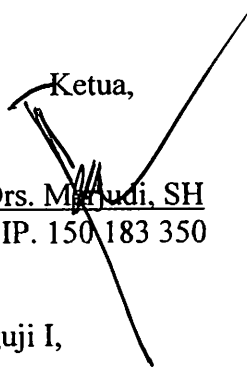
Drs. Mardjudi, SH
NIP. 150183350

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Achmad Zubaidi (C02 304 048) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 24 Pebruari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

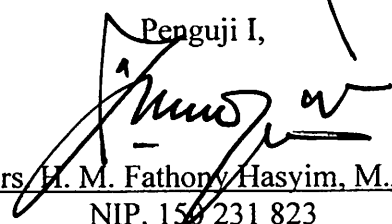
Ketua,


Drs. Marjudi, SH
NIP. 150 183 350

Sekretaris,


Drs. H. Muhammad Arif, MA
NIP. 150 321 632

Penguji I,


Drs. H. M. Fathony Hasyim, M.Ag
NIP. 150 231 823

Penguji II,



Drs. H. Abd. Basith Junaidi, M.Ag
NIP. 150 318 473

Pembimbing,


Drs. Marjudi, SH
NIP. 150 183 350

Surabaya, 24 Pebruari 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Dr. H. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 150 207 785

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana model kepemimpinan dalam partai Demokrat?, dan bagaimana pandangan politik Islam terhadap kepemimpinan dalam partai Demokrat?.

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian lapangan, selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis-deskriptif dengan kerangka pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *Pertama*, model kepemimpinan dalam partai Demokrat menganut demokrasi pancasila. Sebagaimana disadari bahwa, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka, dan menganut sistem konstitusional. Pada dasarnya demokrasi menempatkan kedaulatan ditangan rakyat. Oleh sebab itu, demokrasi yang dipahami partai Demokrat, sebagai upaya sebesar-besarnya menghargai aspirasi-aspirasi rakyat, demi mensejahterakan rakyat sebagai tujuan dari demokrasi itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. *Kedua*, Model kepemimpinan demokrasi pancasila yang dianut partai Demokrat terdapat perbedaan praktek dengan kepemimpinan dalam sejarah pemerintahan Islam yang dipraktekkan Nabi Muhammad dan khulafa' al rasyidin. Akan tetapi, pada hakikatnya tidak bertentangan, karena keduanya sama-sama memperjuangkan keadilan dan hak-hak rakyat. Bahkan Kuntowijoyo berpendapat, bahwa pancasila merupakan obyektifitas Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang kebijakan dan kader-kader partai Demokrat disarankan: *Pertama*, untuk lebih maksimal dalam merealisasikan konsep kepemimpinan demokratis dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak rakyat demi tercapainya kesejahteraan bersama. *Kedua*, dalam melaksanakan kepemimpinannya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan dan keindonesian sebagai landasan moral dalam berpolitik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada berbagai jenis teori atau pendekatan yang muncul untuk mengetahui fenomena kepemimpinan. Teori-teori tersebut berbeda dari sudut pandang dan perspektifnya dalam mengamati kepemimpinan. Jika kita memandang seorang pemimpin berdasarkan karakteristik sifat-sifat yang dimilikinya, maka kita cenderung menggunakan pendekatan teori sifat tersebut. Jika kita memandang seorang pemimpin berdasarkan perilaku-prilaku yang dimunculkan, maka kita cenderung melihat fenomena kepemimpinan dari pendekatan teori perilaku, dan seterusnya.¹

Diskursus kepemimpinan di Indonesia tidak pernah usang diperbincangkan, baik dikalangan akademisi maupun praktisi, baik tingkat regional maupun nasional. Sejarah telah memberikan banyak bukti bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan bumi ini banyak dipengaruhi oleh persoalan kepemimpinan.² Baik peristiwa tersebut berdampak positif ataupun negatif.

¹. Harbani Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi*, h. 84

². Y. W. Sunindhia, dan Widiyanti Ninik, *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern*, h. 01

Permasalahan kepemimpinan adalah permasalahan masa depan bangsa. Krisis multi dimensi yang melanda negara Indonesia, khususnya krisis kepemimpinan, meniscayakan pentingnya mendiskusikan secara terus-menerus persoalan kepemimpinan untuk mencari solusi jangka panjang.

Proses kepemimpinan pada prinsipnya merupakan gejala sosial, karena berlangsung dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial. Kepemimpinan tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan situasi sosio politik yang terbentuk dan sedang berlangsung di lingkungan suatu masyarakat. Oleh karena situasi sosio politik itu selalu berkembang dan dapat berubah-ubah, maka proses kepemimpinan tidak mungkin dilakukan sebagai kegiatan rutin yang diulang-ulang.³

Sampai detik ini sejumlah masalah masih mengidap di tubuh bangsa ini. salah satu faktor penyebabnya ditengarai akibat dari sistem kepemimpinan yang tidak jelas. Dunia mengakui kedaulatan dan kebesaran bangsa Indonesia, walaupun dibidang politik, hukum, dan keamanan, bangsa ini masih rapuh. Rumah bangsa ini seakan-akan tidak punya pagar, kapal-kapal asing bebas keluar masuk menjarah ikan di perut laut pedalaman. Bahkan negara tetangga tanpa rasa takut memindahkan patok-patok batas negara. Sementara, budaya koruptif begitu akut dan sistemik di seluruh struktur urusan publik.

³. M. Dalyono., *Kepemimpinan Menurut Islam*, h. 141-142.

wewenang pada lembaga kepartaian, tanpa adanya kontrol berkelanjutan secara langsung, apakah aspirasi mereka dapat disalurkan atau tidak, bahkan tidak ada mekanisme kontrol yang diciptakan sehingga dapat memudahkan bagi rakyat untuk mengontrol terhadap perilaku elit politiknya, yang kemudian tidak memungkinkan bagi mereka melakukan praktek-praktek nepotisme dalam mengambil kebijakan publik. Lemahnya manajemen dalam suatu lembaga atau parpol akan berakibat pada proses aplikasinya, seperti terjadinya ketidakadilan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Qur'a>n:

فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (الانعام: 152)

“Berlakulah adil walaupun terhadap kerabat.” (al-An'a>m: 152)⁵

Kondisi sistemik yang demikian tidak disikapi secara kritis oleh kebanyakan partai-partai politik yang ada, melainkan kondisi ini justru dimanfaatkan, untuk menggaet pendukung emosional membuta dari massa partainya demi meraih kekuasaan. Popularitas tokoh sering dijadikan sebagai tunggangan politik dengan memakai dalil-dalil agama (politisasi agama). Hal demikian juga menunjukkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia tidak berjalan. Demokrasi tidak lebih hanya sebagai kedok untuk mempertahankan status quo, dan dijadikan slogan untuk mempengaruhi massa.

Kondisi seperti ini, diakui atau tidak, sangat menghambat terhadap kedewasaan rakyat dalam berpolitik. Rakyat dalam menyuarkan aspirasi

⁵. DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 271

Sudah banyak partai politik yang dalam platform perjuangannya mengedepankan aspek moral dan kecintaannya terhadap negara kesatuan republik Indonesia, Namun dalam realitasnya masih banyak pemimpin partai yang sering melakukan tindakan-tindakan amoral bahkan melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Seperti perilaku korupsi yang sering terjadi di lembaga legislatif dan lembaga-lembaga kenegaraan yang lain.

Melihat realitas keragaman pemeluk agama di Indonesia, religiusitas merupakan suatu yang niscaya, Maka dari itu, perlu adanya kesadaran terhadap masyarakat akan sikap toleransi terhadap perbedaan, karena diskriminatif terhadap seseorang yang beda agama adalah bertentangan dengan prinsip keindonesiaan. Kondisi ini tentunya membutuhkan pemimpin yang bijak dan peka terhadap problem bangsa yang plural ini, sehingga mampu mengakomodir semua kepentingan bangsa tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan yang dianggap berbeda dalam pandangan politiknya maupun dalam hal lain.⁷

Dalam konteks ini, walaupun Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dalam banyak hal, seperti bahasa, budaya, agama dan sebagainya, akan tetapi hal tersebut tidak berarti menghalangi kita untuk bersatu dalam membangun bangsa. Sudah menjadi fakta sejarah di Indonesia, dari keragaman tersebut lahirlah solidaritas nasional atau dengan istilah lain lahirlah jiwa-jiwa nasionalis, yang mampu menumpas penjajahan. Dengan kesadaran bersama tersebut, setiap penjajahan, ketidakadilan, penindasan, apapun bentuknya dapat ditumpas, yang

⁷. <http://gpajaksel.tblog.com/post/1969906647>

pada akhirnya mampu melahirkan negara berdaulat yakni NKRI.⁸ Ada yang berpendapat bahwa nasionalisme di Indonesia lahir pada abad ke-20, saat kaum terpelajar mulai menyadari pentingnya kesadaran bersama untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Perasaan senasib yang meluas telah menyatukan kepentingan kedaerahan dan kesukuan menjadi kepentingan nasional yang harus diperjuangkan.⁹

Keberadaan partai politik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan setiap negara demokrasi. Partai politik dianggap sebagai salah satu institusi yang mampu mengakomodir aspirasi rakyat serta dapat dijadikan alat kontrol bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak menentukan figur yang akan menjadi pemimpin yang nantinya dapat menentukan kebijakan umum (*public policy*).

Persolaannya kemudian adalah, sejauh mana peran dan fungsi partai politik dalam membangun peradaban bangsa?. Pada idealnya partai politik memiliki beberapa fungsi; *Pertama*, Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. *Kedua*, Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada

8. http://www.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=85AD/ART Partai Demokrat Bab IX Pasal 56.

9. Yuddy Chrisnandi., *Beyond Parlemen; Dari Politik Kampus Hingga Sukses Kepemimpinan Nasional*, h. 57

pemerintah. *Ketiga*, Sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. *Keempat*, Sebagai pengelola konflik, yaitu mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawanya keparlemen untuk mendapatkan penyelesaian melalui keputusan politik. *Kelima*, Sebagai sarana artikulasi dan agegrasi kepentingan, menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. *Keenam*, Sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat.¹⁰

Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, muncul suatu pertanyaan yang cukup menggugah, apakah partai-partai yang muncul setelah era reformasi telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan baik?. Pada awal pendiriannya, suatu partai akan mengatakan kepada calon pendukungnya bahwa partai tersebut didirikan untuk memperjuangkan rakyat kecil, memperbaiki nasib kalangan bawah dan segudang janji manis lainnya. Hal itu mereka dengung-dengungkan sepanjang masa kampanye. Namun, seiring dengan selesainya Pemilihan Umum (PEMILU) maka janji tinggallah janji, itu yang menjadi fakta sejarah. bagaimana

¹⁰. <http://gpajaksel.tblog.com/post/1969906647>

2. Menjelaskan, bagaimana politik Islam memandang kepemimpinan yang ada dalam partai Demokrat. Apakah terdapat kesesuaian dengan kepemimpinan yang ada dalam Islam

Jadi, maksud dari judul "Kepemimpinan Dalam Partai Demokrat Perspektif Politik Islam" adalah, untuk mengetahui tinjauan politik Islam terhadap Kepemimpinan dalam partai Demokrat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat yang selanjutnya dinamakan data *primer*. dan data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data *sekunder*.¹³

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pola pikir deduktif. Dimana data pokok atau data primernya diperoleh dengan cara meneliti langsung di lapangan, seperti wawancara, diskusi dan diperoleh dari tulisan-tulisan pihak terkait dan relevan.

2. Sumber Data

¹³. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 24

Analisis deskriptif adalah mengolah data dengan cara menggambarkan atau menguraikan data yang diperoleh mengenai suatu masalah dan data tersebut kemudian di bandingkan. Adapun data yang di analisa dalam penelitian ini mengenai kepemimpinan dalam partai Demokrat perspektif politik Islam.

G. Sistematika Pembahasan

- BAB I** : Pendahuluan: Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan terakhir Sistematika Pembahasan.
- BAB II** : Landasan Teori: Dalam bab ini akan dibahas tentang kepemimpinan dalam politik Islam.
- BAB III** : Kepemimpinan dalam Partai Demokrat. Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah berdirinya Partai Demokrat, kepemimpinan dalam Partai Demokrat.
- BAB IV** : Analisis: Kepemimpinan dalam Partai Demokrat perspektif politik Islam.
- BAB V** : Penutup, berisi kesimpulan dan saran

BAB II

KEPEMIMPINAN DALAM POLITIK ISLAM

A. Pengertian dan Model-Model Kepemimpinan

Menurut Buchari Zainun "Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kekuatan atau ketangguhan yang bersumber dari kemampuan untuk mencapai cita-cita dengan keberanian menghambil resiko yang bakal terjadi".¹ Dengan kekuatan atau ketangguhan itu seseorang atau kelompok orang mampu menguasai dan mengendalikan orang banyak untuk mencapai cita-cita yang dimaksud.

Dalam bahasa Inggris kepemimpinan disebut *leadership*. Sedangkan pemimpin disebut *leader*. Jadi secara arti bahasanya seorang *leader* harus memiliki *leadership* yang bagus dan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya.

Dalam Islam banyak istilah yang dipakai terkait pemimpin dan kepemimpinan. Seperti Khalifah, Imam, dan Amir waktu pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Walaupun berbeda-beda dalam memakai istilah, akan tetapi substansinya sama. Seorang pemimpin wajib dipatuhi oleh rakyatnya selama pemimpin tidak menyimpang dari aturan-aturan atau hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

¹. Y. W. Sunindhia, dan Widiyanti Ninik, *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern*, h. 14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

(النساء: 59)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan pemimpin diantara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul kalau kalian benar-benar berian kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik kesudahannya.” (al-Nisa>: 59)²

Dalam sejarah kepemimpinan para ahli memetakan beberapa model di dalam kepemimpinan itu, antara lain:

1. Kepemimpinan Otokratis

Kepemimpinan otokratis artinya pemimpin yang menganggap organisasi sebagai miliknya sendiri. Ia bertindak diktator terhadap bawahannya. Setiap kebijakan yang dikeluarkan adalah unsur paksaan dan ancaman-ancaman pidana, sehingga bawahan hanya dapat manut tanpa bisa membantah apa yang menjadi kebijakannya.

Pemimpin yang seperti ini tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat, walaupun ada rapat atau musyawarah, akan tetapi hal tersebut hanya untuk menyampaikan intruksi-intruksi atau perintah-perintah. Kepemimpinan semacam ini dapat kita jumpai dalam pemerintahan feodal oleh kerajaan-kerajaan pada abad pertengahan.³

². DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 158

³. Y. W. Sunindhia, dan Widiyanti Ninik, *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern*, h. 30

Tipe kepemimpinan otokratis ini sangat tidak disukai Allah dan sesama manusia karena dianggap tidak manusiawi, sehingga di dalam al-Qur'a>n difirmankan berupa riwayat Fir'aun:

وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. (يونس: 83).

*Dan sungguh Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan dia termasuk orang-orang yang melampui batas. (Yunus: 83)*⁴

Ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kepemimpinan otoriter tidak dibenarkan menurut ajaran Islam.⁵

2. Kepemimpinan Militeristis

Kepemimpinan militeristis yaitu pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang antara lain; *pertama*, untuk menggerakkan bawahannya ia menggunakan sistem perintah yang biasa digunakan dalam ketentaraan, *kedua*, gerak-geriknya senantiasa tergantung kepada pangkat dan jabatannya, *ketiga*, senang akan formalitas yang berlebih-lebihan, *keempat*, menuntut disiplin keras dan kaku dari bawahannya, *kelima*, senang akan upacara untuk berbagai keadaan, *keenam*, tidak menerima kritik dari bawahannya, dan lain sebagainya.

3. Kepemimpinan Paternalistis

Kepemimpinan semacam ini boleh dikatakan untuk seorang pemimpin yang bersifat “kebapakan”, ia menganggap bawahannya atau anak buahnya sebagai “anak” atau manusia yang belum dewasa yang dalam segala hal masih butuh

⁴. DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 400

⁵. M. Dalyono., *Kepemimpinan Menurut Islam*, h. 166

bantuan dan perlindungan, yang kadang-kadang perlindungan yang berlebihan.

Pemimpin semacam ini tidak ada sifat keras atau kejam terhadap bawahannya, akan tetapi, sisi negatif dari model kepemimpinan semacam ini yaitu bersifat sok maha tahu.⁶

4. Kepemimpinan Kharismatis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dikemukakan bahwa “karismatik berarti bersifat karisma”.⁷ Sedangkan perkataan karisma diartikan sebagai “keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya”, atau atribut kepemimpinan didasarkan atas kualitas kepribadian individu.

Sejalan dengan ungkapan KBBI di atas, kepemimpinan kharismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan dan kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain, sehingga dengan kekaguman batinnya mereka (bawahannya) bersedia melakukan apa saja yang dia inginkan atau yang diperintahkannya. Dengan kata lain, kepemimpinannya dipandang istimewa karena sifat-sifat kepribadiannya yang mengagumkan dan berwibawa.

⁶. Y. W. Sunindhia, dan Widiyanti Ninik, *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern*, h. 32

⁷. Kamus Besar Bahasa Inonesia, h. 775

Seorang pemimpin yang memiliki kharisma dan beriman selalu menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kepribadiannya sebagai pemberian Allah swt. Oleh karena itu akan selalu pula digunakannya untuk mengajak dan mendorong orang yang dipimpinnya berbuat sesuatu yang diridhai Allah dalam rangka memakmurkan bumi, sebagai tugas kekhalfahannya. Demikianlah Allah berfirman dalam al-Qur'a>n:⁸

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (الانعام : 165).

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa bumi, Dia meninggikan sebagian kamu dari sebagian yang lain beberapa tingkat. Karena Dia hendak mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu cepat memberikan siksaan. Namun Dia juga maha pengampun dan maha penyayang". (al-An'a>m: 165)⁹

5. Kepemimpinan "Laisses Faire" atau Bebas

Model kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari model kepemimpinan otoriter atau otokratis. Perilaku yang dominan dalam kepemimpinan ini adalah perilaku dalam gaya kepemimpinan kompromi dan perilaku kepemimpinan pembelot. Dalam proses kepemimpinan ini ternyata pemimpin tidak melakukan fungsinya dalam menggerakkan orang-orang yang menjadi

⁸. M. Dalyono., *Kepemimpinan Menurut Islam*,...h. 175

⁹. DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 274

bawahnya. Dengan kata lain, pemimpin semacam ini bisa dikatakan pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajibannya.¹⁰ Kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab, dalam sejarahnya yang diceritakan melalui firman Allah dalam al-Qur'a>n terjadi di lingkungan orang-orang kafir, seperti yang dijelaskan dalam surat *ash-Shaffa>t* ayat 27 sampai dengan *ayat 30*:

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ . قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ . قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ . وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنِ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَغِينَ (الصفت : 27-30).

Sebagian mereka menemui yang lain; Tanya-bertanya, salah-menyalahkan. Golongan pengikut menuduh kepada pemimpin-pemimpin mereka: “sungguh, kamulah yang mendatangi kami dari kanan. Golongan ppimpinan menjawab: “sebenarnya, kalianlah yang tidak beriman.” kami sekalian tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kalian orang-orang yang durhaka.(as}-S}affa>t: 27-30).¹¹

6. Kepemimpinan Demokratis

Tipe kepemimpinan demokratis lazimnya dipandang sebagai kebalikan dari kepemimpinan otokratis.¹² Kepemimpinan demokratis menempatkan faktor manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam sebuah Negara atau organisasi. Definisi yang sering dipakai pada umumnya adalah “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Hal ini dapat dipahami bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi dalam proses pengambilan kebijakan seorang pemimpin

¹⁰. M. Dalyono, *Kepemimpinan Menurut Islam*, h. 168

¹¹. DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 882

¹². Y. W. Sunindhia, dan Widiyanti Ninik, *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern*, h. 38

tidak sesukanya sendiri, akan tetapi melalui kesepakatan bersama. Semua aspirasi rakyat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa model kepemimpinan demokratis selalu berpihak pada kepentingan rakyat, dengan berpegang pada prinsip mewujudkan kebenaran dan keadilan untuk kepentingan bersama. Konsep semacam itu jelas sejalan dengan ajaran Islam yang sangat mengutamakan perilaku yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana Allah berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة : 42).

"Janganlah kamu campur adukkan antara yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, padahal kamu mengetahui". (al-Baqarah: 42).¹³

Dari ayat di atas jelas bahwa kepemimpinan demokratis dapat diterima di dalam kepemimpinan Islam yang sangat mementingkan keterbukaan, dalam setiap penyelesaian persoalan. Pengambilan keputusan selalu melalui proses musyawarah. Allah berfirman dalam al-Qur'a>n:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران: 159).

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkal kepada Allah" (al -Imra>n: 159).¹⁴

Model kepemimpinan demokratis itu sejalan dengan model kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Selama menjadi pemimpin di negara Madinah, yang

¹³. DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 12

¹⁴. *Ibid*, h. 214

sering juga disebut negara Islam pertama, di negara tersebut dalam setiap pengambilan kebijakan Nabi selalu melibatkan para sahabat untuk bermusyawarah. Dengan kata lain, dalam proses memutuskan kebijakan beliau senantiasa membudayakan mekanisme musyawarah, walaupun pada dasarnya Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, yang setiap perilaku, ungkapan, dan ketetapanannya merupakan peragaan dari ajaran-ajaran yang telah digariskan oleh al-Qur'a>n, akan tetapi nabi masih membudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.¹⁵

Timbulnya berbagai macam istilah dalam kepemimpinan Islam atau kepala Negara tidak mempengaruhi hakekat kepemimpinan itu sendiri, yaitu sebagai pengatur umat dalam urusan dunia dan akhirat.¹⁶

Memang di dalam al-Qur'a>n tidak ditemukan ayat yang secara rinci menjelaskan tentang pengertian (teori) kepemimpinan Negara, namun ada beberapa ayat yang memberikan isyarat-isyarat tentang itu, seperti firman Allah yang tertera di dalam al-Qur'a>n menjadi dasar kepemimpinan umat sebagai petunjuk (*Hudan*) kearah kebajikan:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ (الانبیاء : 73).

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami lah mereka selalu menyembah." (al-Anbiya>': 73).¹⁷

¹⁵. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran)*, h. 16

¹⁶. Achmad Zunaiddi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Kepemimpinan ABRI*, h. 11

¹⁷. DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 623

1. Islam menggunakan istilah khalifah atau wakil bukanlah dalam artian kekuasaan tertinggi. Karena kekuasaan tertinggi menurut Islam adalah kekuasaan Allah swt. Setiap orang yang memegang kepemimpinan dan menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan hukum Allah, orang tersebut merupakan wakil dari sang-Maha kuasa yaitu Allah swt.
2. Kekuasaan untuk memerintah dunia atau memimpin dunia dijanjikan kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali.

B. Kepemimpinan Nabi Muhammad saw.

Nabi Muhammad saw. lahir di tengah-tengah masyarakat yang kehidupannya sudah tidak mencerminkan manusia, yang biasa disebut kaum *jahiliyah*. Pada saat itu, kehidupan masyarakat Makkah penuh dengan takhayul, dan hukum yang dipakai setiap harinya yaitu hukum rimba, dimana yang kuat menindas yang lemah.

Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membawa rahmat keseluruhan alam. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat, Beliau memiliki kemampuan tinggi dalam menarik simpati dan mempengaruhi orang lain, jauh melampaui kewenangannya, dengan misi kerasulan yang diembannya.²⁰

Keberhasilan dalam kepemimpinannya itu tidak terlepas dari sifat-sifat dasar etika kepemimpinan yang melekat pada diri Rasulullah, yakni *s}iddiq* (jujur), *ama>nah* (dapat dipercaya), *tablig* (menyampaikan) yaitu transparan

²⁰. Nana Rukmana D.W., *Etika Kepemimpinan Perspektif Agama dan Moral*, h.109

kemudian menjadi sebuah negara, yakni negara Islam Madi>nah.²⁵ Suatu negara yang wilayah kekuasaannya diakhir zaman Nabi meliputi seluruh sepanjang Arabia. Masyarakat Madi>nah yang diorganisir Nabi ketika itu merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya suatu umat Islam.²⁶ Dengan kata lain, ketika di Makkah Nabi hanya memimpin komunitas Muslim saja, sedangkan di Madi>nah tidak hanya memimpin komunitas muslim saja bahkan juga merangkap sebagai pemimpin negara.

Pembentukan masyarakat baru itu, yang kemudian menjelma menjadi sebuah negara dan pemerintahan ditandai dengan kesepakatan perjanjian (*sosial contract*) yang tertulis pada tahun 622 M antara Nabi dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Madi>nah segera setelah beliau hijrah ke kota itu. Perjanjian inilah yang kemudian disebut *s}afih{at*, atau yang lebih populer disebut sebagai *mis}aq al-Madi<nah* (Piagam Madi>nah).²⁷ Piagam Madi>nah inilah yang diidentifikasi oleh sebagian generasi ilmuwan yang datang kemudian sebagai sebuah konstitusi bagi negara modern.

Konstitusi ini terdiri dari 47 pasal,²⁸ yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban rakyat terhadap negara dan sebaliknya hak dan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Butir-butir piagam Madi>nah yang terkandung di dalamnya mengatur tata pergaulan dan komunikasi secara timbal balik sehingga hak-hak

²⁵. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, h. 92

²⁶. Masykur Hakim, Tanu Widjaya, *Model Masyarakat Madani*, h. 40

²⁷. Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsi-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'a>n*, h. 03

²⁸. Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran)*, h. 10

dasar setiap warga negara dapat terjamin dengan aman dan mempunyai kekuatan hukum. Realitas penduduk Madinah adalah penduduk yang majmuk dari segi agama dan keyakinan.

Sebagai pimpinan atau kepala negara, tindakan-tindakan Nabi mengandung prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat yang umumnya diterima oleh kelompok-kelompok sosial Madinah, menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka, dan menekankan pada hubungan baik dan kerja sama serta hidup berdampingan secara damai diantara mereka dalam kehidupan sosial politik. Dengan demikian mereka dapat mewujudkan kemasyhuran hidup dan terhindar dari permusuhan.²⁹

Fungsi Nabi di Madinah tidak terbatas hanya pada penyelesaian masalah yang terjadi di lingkungan internal umat Islam, akan tetapi juga meluas kepada warga-warga non-Muslim. Pada saat itu, beliau secara bersamaan memegang tiga posisi:

1. Beliau adalah seorang Imam, pemimpin agama dan pemberi hukum. Apa saja yang beliau katakan atau lakukan adalah bersifat memerintah.
2. Keputusan-keputusannya berkenaan dengan perselisihan intern dan perkara-perkara hukum bersifat mengikat dan sah.
3. Beliau memegang kepemimpinan sosial dan politik. Disamping menyebarkan, menjelaskan perintah-perintah Allah dan bertindak sebagai hakim untuk

²⁹. Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsi-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, hal. 10

memutuskan perselisihan-perselisihan di antara kaum Muslimin, beliau juga mengatur urusan-urusan sosial dan politik mereka.³⁰

Konstitusi yang mengatur juga membuktikan bahwa penduduk Madinah memberikan loyalitas dan kesetiaan kepada beliau, baik dalam kapasitasnya sebagai Nabi maupun sebagai kepala negara. Hal ini diperlukan mengingat keragaman penduduk Madinah ketika itu.³¹

Sesuai misi kerasulannya sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam, Rasulullah mampu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan (*hablun min Allah*) dan hubungan sesama manusia di lingkungan sekitarnya (*hablun min al-Nas*).³² Sehingga pengikutnya merasakan kemudahan dalam berinteraksi dengan beliau, yang disatu sisi sebagai Rasulullah, dan disisi yang lain sebagai pemimpin negara Madinah.

Ada beberapa bukti yang menunjukkan, bahwa nabi Muhammad sebagai kepala negara di Madinah;

1. Beliau mengatur hubungan berbagai komunitas, dengan prakarsa menerbitkan *Piagam Madinah*.
2. Membuat peraturan untuk dipatuhi masyarakat luas, seperti, menarik pajak dan melarang riba dalam rangka pembangunan ekonomi, serta menjatuhkan hukuman kepada yang melanggarnya.
3. Peraturan yang diumumkan dipatuhi oleh masyarakat.

³⁰. Murtadha Muthahhari, *Kepemimpinan Islam*, h. 23

³¹. Masykur Hakim, Tanu Widjaya, *Model Masyarakat Madani*, h. 43

³². Nana Rukmana D.W., *Etika Kepemimpinan Perspektif Agama dan Moral*, h. 112

4. Beliau melakukan kontak dengan kerajaan Persia dan Romawi.
5. Beliau pernah menerima kunjungan kenegaraan dari utusan negeri lain.³³

C. Kepemimpinan Pada Masa *Khulafa' Al-Rasyidin*

Praktek kepemimpinan dalam Islam yang sering dijadikan rujukan setelah Nabi Muhammad adalah kepemimpinan pada masa *Khulafa' al Rasyidin*. Ada empat (4) masa kepemimpinan dalam periode *Khulafa' al-Rasidin*, yaitu:

1. Kepemimpinan Abu Bakar al-Siddiq

Setelah terpilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, Abu Bakr menyampaikan pidato kenegaraan di Masjid Nabawi.

"Wahai manusia, sesungguhnya aku telah dipercayakan untuk memangku jabatan khalifah, padahal aku bukanlah orang paling baik diantara kalian. Kalau aku menjalankan tugasku dengan baik, bantulah aku. Sebaliknya, kalau aku salah, luruskanlah langkahku. Kebenaran adalah kepercayaan dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah dikalangan kamu, adalah kuat dalam pandanganku, sesudah haknya aku berikan kepadanya. Sebaliknya, orang yang kuat diantara kalian aku anggap lemah setelah haknya aku ambil. Bila ada yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menghinakannya. Bila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana kepada mereka. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi selama saya tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya, gugurlah kesetiaan kepadaku. Laksanakan s'alat, Allah akan memberimu Ramat."³⁴

Pidato pelantikan ini memperlihatkan garis kebijakan yang akan ditempuh oleh Abu Bakr sebagai nahkoda baru bahtera negara Madinah. Garis kebijakan ini begitu modern dan "terlalu maju" untuk kondisi dunia pada

³³. M. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, h. 60-61

³⁴. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 47

egaliter dan demokratis. Pidato pelantikan Abu Bakr sebagaimana dikutip di atas, menunjukkan betapa Abu Bakr menerapkan pola pemerintahan yang benar-benar modern di tengah-tengah situasi masyarakat dunia menganut sistem kerajaan absolut dan mengesampingkan hak-hak rakyatnya.³⁶

2. Kepemimpinan 'Umar ibn al-Khat{t}ab

Setelah dilantik menjadi khalifah, 'Umar berpidato dihadapan umat Islam untuk menjelaskan visi politik dan arah kebijakan yang akan dilaksanakannya dalam memimpin kaum Muslimin.

"Aku telah dipilih menjadi khalifah. Kerendahatian Abu Bakr sejalan dengan jiwanya yang terbaik di antara kalian dan lebih kuat terhadap kalian serta juga lebih mampu memikul urusan-urusan kamu yang penting. Aku diangkat untuk menjadi khalifah tidak sama dengan beliau. Seandainya aku tahu ada orang yang lebih kuat untuk memikul jabatan ini dari padaku, maka aku lebih suka memilih memberikan leherku untuk dipenggal dari pada memikul jabatan ini".³⁷

Setelah dilantik menjadi kepala negara, 'Umar segera melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Pada prinsipnya, 'Umar melanjutkan kebijakan-kebijakan Abu Bakr. Namun, karena permasalahan yang dihadapi 'Umar semakin berkembang seiring dengan perkembangan dan perluasan daerah kekuasaan Islam, 'Umar melakukan berbagai kebijakan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapinya. Kebijakan 'Umar sebagai kepala negara meliputi pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan

³⁶. *Ibid*, h. 53

³⁷. *Ibid*, h. 55

tentaranya untuk memerangi Ali. Sedangkan di Mekah, Aisyah menggalang kekuatan pula bersama Talhah dan Zubeir untuk melawan Ali. Namun demikian, Ali tetap dianggap sah menduduki jabatan khalifah, karena didukung oleh sebagian besar rakyat.

Setelah pelantikan, Ali menyampaikan pidato visi politiknya dalam suasana yang kacau di Masjid Nabawi.

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menurunkan al-Qur'a>n sebagai petunjuk yang menjelaskan yang baik dan yang buruk. Ikutilah kebaikan dan jauhilah kejahatan. Kalau engkau menjalankan kewajiban yang digariskan-Nya, maka kelak engkau akan masuk surga. Allah mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan-Nya dan memuliakan kehormatan manusia dan sangat menekankan keikhlasan serta tauhid umat Islam. Orang Islam harus memberi kesejahteraan bagi manusia lainnya dengan perkataan dan perbuatannya. Karenanya, janganlah kamu menyakiti orang lain. Segeralah melaksanakan kepentingan sosial."⁴²

Setelah sah sebagai khalifah, hal pertama yang dilakukan Ali adalah memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat Usman sebelumnya dan menarik kembali kekayaan negara yang dibagi-bagikan Usman kepada kerabatnya.

Meskipun masa pemerintahan Ali yang selama enam tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, Ali bertekad menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan egaliter, Ali mengambil kembali harta negara yang dibagi-bagikan Usman kepada pejabat-pejabatnya. Seperti diuraikan diawal. Ali juga

⁴². *Ibid*, 76

mengirim surat kepada gubernur dan pejabat daerah lainnya untuk bijaksana dalam menjalankan tugasnya dan tidak mengecewakan rakyat.

Dalam sikap egalitarian, Ali bahkan mencontohkan sosok seorang kepala negara yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya. Dalam suatu kasus, Ali berperkara di pengadilan dengan seorang Yahudi mengenai baju besi. Yahudi tersebut, dengan berbagai argumentasi dan saksinya, mengklaim bahwa baju tersebut miliknya. Karena Ali tidak dapat mengajukan bukti-bukti dalam pembelaannya, maka hakim memutuskan memenangkan dan mengabulkan tuntutan Yahudi tersebut. Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa 'Umar dan Abu Bakr sebelumnya. Namun kondisi masyarakat yang kacau balau dan tidak terkendali lagi menjadikan usaha Ali tidak banyak berhasil. Umat lebih memperhatikan kelompoknya dari pada kesatuan dan persatuan. Akhirnya, praktis selama pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurus persoalan pemberontakan di berbagai daerah.⁴³

⁴³. *Ibid*, h. 78

BAB III

KEPEMIMPINAN DALAM PARTAI DEMOKRAT

A. Sejarah Berdirinya Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara pada pemilihan calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil *pooling public* yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi pemimpin bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara¹ Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim “Krisna Bambu Apus” dan selanjutnya teknis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya mendirikan sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara

¹. Saudara merupakan panggilan atau sebutan bagi kader Partai Demokrat.

lain: Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di Apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara maraton setiap hari. Tim itu terdiri dari:

1. Vence Rumangkang
2. A. Yani Wahid (Alm)
3. Achmad Kurnia
4. Adhiyaksa Dault,
5. Baharuddin Tonti dan
6. Shirato Syafei.

Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara **Vence Rumangkang** menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Sutan Bhatogana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni:

1. Vence Rumangkang
2. Ahmad Mubarok
3. A. Yani Wachid (almarhum)
4. Subur Budhisantoso;
5. Irzan Tanjung
6. RMH. Heroe Syswanto Ns.
7. RF. Saragjh
8. Dardji Darmodihardjo
9. Rizald Max Rompas dan
10. T Rusli Ramli, MS.

Disamping nama- nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Susilo Bambang Yudoyono.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang-Undang Keparintaan dibutuhkan minimal 50 (lima puluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa

kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau Jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang.

Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.²

B. Ideologi Partai Demokrat

Partai Demokrat menganut ideologi nasionalis-religius dalam arti bahwa secara horizontal, pusat perhatian partai adalah pada mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kecintaan kepada bangsa, vertikalnya dalam membangun manusia, masyarakat dan Bangsa Indonesia dilandasi oleh semangat

².http://www.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=12

keagamaan, yakni beriman kepada Tuhan Sang Pencipta dan menyebarkan kasih sayang Tuhan dimuka bumi.

Sebagai wujud dari semangat nasionalisme, keanggotaan Partai Demokrat terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki komitmen untuk membangun masa depan bangsa berhak untuk memperoleh perhatian dari partai dan berhak untuk bergabung di dalam wadah perjuangan Partai Demokrat.

Partai Demokrat meyakini kebenaran Pancasila sebagai Dasar Negara dan falsafah bangsa. Dinamika sejarah Indonesia membuktikan bahwa Ideologi Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan kekuatan bangsa setiap kali terjadi krisis disintegrasi bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa diperkaya dengan konsep budaya modern, budaya global dan nilai-nilai universal.

Partai Demokrat memiliki Idealisme perjuangan yang terkenal dengan Trilogi Perjuangan; Demokrasi, Kesejahteraan dan Keamanan. Sesuai dengan tuntutan zaman di tengah dunia global, Demokrasi, Kesejahteraan, dan Keamanan merupakan tiga hal yang secara sinergis harus selalu diperjuangkan. Pada hakikatnya perjuangan demokrasi adalah upaya sebesar-besarnya menghargai aspirasi-aspirasi rakyat yang dengan itu mereka memperoleh peluang yang luas untuk menyalurkan aspirasi dan berkontribusi dan selanjutnya memperoleh jaminan untuk menikmati hasil perjuangan secara profesional. Demokrasi bukan tujuan perjuangan, tetapi alat dan cara berjuang.

(keturunannya). Ajaran inilah yang menjelma menjadi HAM dalam budaya modern. Dalam pergaulan antar manusia Partai Demokrat mengakui dan menghormati adanya berbagai solidaritas, seperti solidaritas keagamaan, solidaritas nasional dan solidaritas kemanusiaan. Bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, menentang penjajahan di muka bumi yang dilakukan oleh bangsa kuat kepada bangsa yang lemah.³ Bangsa Indonesia juga harus menentang setiap ada penindasan azazi manusia yang terjadi dibelahan dunia manapun sebagai wujud solidaritas kemanusiaan (humanisme).⁴

C. Visi dan Misi Partai Demokrat

1. VISI:

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

2. MISI:

³. UUD 1945.

⁴.http://www.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=8

- a. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
- b. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
- c. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga.⁵

⁵. http://www.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=12

SBY tetap maju terus dan akhirnya berhasil. *Kedua*, keputusan SBY menurunkan subsidi dan menaikkan harga BBM.⁹ Apapun yang terjadi dalam kurun waktu 2004-2009, paling tidak ada dua putusan besar yang menjadi sejarah keberanian SBY.

Kasus kekerasan terhadap kelompok yang berbeda pandangan atau kepercayaan adalah salah satu bentuk intoleransi yang seharusnya tidak terjadi pada bangsa yang plural ini. Anas Urbaningrum (Ketua DPP Partai Demokrat) memberikan statmen bahwa terjadinya kasus kekerasan di Monas pada hari minggu, 01 Juni 2008, yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap sekelompok massa yang menamakan diri sebagai *Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan* (AKKBB). adalah bentuk nyata dari ketidakdewasaan menyikapi perbedaan dan dinilai tidak toleran, kekerasan karena perbedaan adalah ancaman bagi masa depan Indonesia yang majemuk dan hal semacam ini tidak boleh dibiarkan, karena kalau ini dibiarkan, akan merusak semangat kita ber-Bhinneka Tunggal Ika. Apapun alasannya, tidak boleh ada warga negara yang melakukan kekerasan atau melanggar hak sipil orang lain. FPI memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, tetapi tidak berhak melakukan kekerasan terhadap kelompok lain. Jalur kekerasan yang ditempuh FPI, dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai Islam.¹⁰ Dia menilai bahwa Islam sangat menghargai perbedaan.

9. *Ibid.* 49

¹⁰. <http://www.antara.co.id/arc/2008/6/1/partai-demokrat-kritik-kekerasan-fpi/>

Dengan menghormati keragaman dan perbedaan pandangan, maka sinergisitas dialog dengan berbagai bentuknya kita mampu melanjutkan misi Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam dan bukannya permusuhan apalagi laknat.

Anas Urbaningrum juga berpendapat terkait dengan kehidupan demokrasi. Menurut dia, kehidupan demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan benar. Sangat tidak adil kalau dikatakan bahwa perjalanan sepuluh tahun demokrasi dikatakan gagal. Lima tahun pertama pada Pemilu 2004 merupakan tahap awal pembangunan demokrasi pascasistem otoriter. Pemilu 2009 merupakan etape lanjutan pembangunan demokrasi kita. Ini merupakan sinyal optimistis akan masa depan demokrasi kita pada jalan yang benar dan sedang mencari bentuk."

Meski begitu, Anas sepakat dengan perbaikan sistem kepartaian yang merupakan bagian sistem demokrasi. Namun, katanya, perbaikan sistem kepartaian jangan sekadar ditandai penyederhanaan jumlah partai politik, tapi juga penyederhaan ideologi dan tata nilai partai politik sehingga koalisi lebih mudah dilakukan.¹¹

Sementara, Achmad Syafi'I berpendapat, "Kalau kita kembali pada fitrah kita sebagai manusia, maka yang harus kita sadari adalah, bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah swt (*Syari>'ah*), Hukum Negara, Serta adat-istiadat yang telah menjadi kesepakatan umum di lingkungan sosial kita. Seperti, ajaran agama, aturan-aturan

¹¹. http://www.indonesia.go.id/id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6716

pemerintah dan hukum adat yang berlaku dilingkungan kita, itu yang namanya akhlak hidup. Salah satu yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin adalah akhlak hidup yang baik, dan peka terhadap problem masyarakatnya sesuai dengan adat yang berlaku. Hal itu merupakan mengejawantahan dari kehidupan demokrasi yang tidak mencederai orang atau golongan lain. Orang yang sudah berakhlak baik, dan peka terhadap problem masyarakatnya sesuai dengan adat yang berlaku, berarti dengan sendirinya sudah paham dengan kehidupan demokrasi yang sudah ada.¹²

Sebagai Muslim, kita harus selalu berpegang teguh pada kitab suci; al-Qur'a>n dan Hadis|. Sesuai dengan hakikat penciptaan manusia sebagai *khalifah fil Ard*, bahwa hidup di dunia ini merupakan perjuangan melestarikan alam yang diamankan Allah swt. Perjuangan untuk kebaikan merupakan ibadah, itu sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur'a>n, bahwa Allah swt menciptakan jin dan manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah. Ibadah itu jangan hanya dipahami dengan berbentuk ritual-ritual saja, misalkan shalat, puasa dan sebagainya. Akan tetapi, bisa berbentuk ibadah sosial, seperti tolong menolong sesama makhluk sosial dalam kebaikan.

Secara kuantitas Muslim merupakan mayoritas di Negara Indonesia, akan tetapi, kita tidak boleh diskriminatif terhadap non-Muslim. Selama mereka tidak memerangi atau mengganggu kehidupan kita, kita tidak dibenarkan mengganggu

¹². Achmad Syafi'I, *Wawancara*. Di Rumah kontrakannya yang sekaligus Posko pemenangan Caleg DPR RI partai Demokrat, Jl. Asam Manis Pamekasan, tanggal, 10 Januari, 2009 Pukul. 19. 30 WIB.

mereka. Bahkan nabi Muhammad pernah bersabda; barang siapa menyakiti kafir dzimmi,¹³ maka orang tersebut seperti menyakiti saya.¹⁴

Di negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat telah menyebabkan setiap orang untuk tidak lagi takut mengkritik penguasa. Kebebasan bersuara semakin luas dengan adanya kemerdekaan pers yang jauh lebih luas dalam memberikan informasi kepada publik. Kesadaran atas keberanian masyarakat pada akhirnya memaksa penguasa untuk tak lagi tipis telinga. Seorang pemimpin harus benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat, karena pada hakikatnya pemimpin merupakan abdi rakyat, dan itu merupakan substansi dari demokrasi itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam AD/ART, bahwa hakikat perjuangan demokrasi adalah upaya sebesar-besarnya menghargai aspirasi-aspirasi rakyat yang dengan itu mereka memperoleh peluang yang luas untuk menyalurkan aspirasi dan berkontribusi dan selanjutnya memperoleh jaminan untuk menikmati hasil perjuangan secara profesional. Demokrasi bukan tujuan perjuangan, tetapi alat dan cara berjuang.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu, Undang-

¹³. Orang non-Islam yang ada di negara Islam dan memilih berdamai dengan orang Islam.

¹⁴. Sugiharto, *Wawancara*. Di kediamannya Sidoserma Surabaya, pada tanggal 27 Januari 2009, Pukul: 22. 00

Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu, *Pertama*, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*). *Kedua*, Sistem Konstitusionil. Pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah *Rechstaat* dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.¹⁵

¹⁵. Yunianto Wahyudi, *Wawancara* di Kantor DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Kamis 26 Pebruari 2009.

BAB IV

ANALISIS KEPEMIMPINAN DALAM PARTAI DEMOKRAT

PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

A. Kepemimpinan Dalam Partai Demokrat

Setiap partai politik (parpol) tentu memiliki ideologi yang dipertahankan sebagai pola tata tertib sosial politik yang ideal. Pasca orde baru (ORBA), negara Indonesia menganut politik multi partai, hal ini di sinyalir merupakan bentuk dari perkembangan demokrasi yang selama kurang lebih 32 tahun dibungkam. Salah satu konsekwensi dari perubahan di atas adalah munculnya partai-partai politik (Parpol) yang beragam dari ideologinya sesuai dengan keyakinan masing-masing parpol tersebut.

Ideologi parpol dapat dimaknai sebagai nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana menentukan kepemimpinannya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.¹

Salah satu parpol yang notabene produk orde reformasi, yaitu partai demokrat. Partai Demokrat menganut ideologi nasionalis-religius dalam arti kepemimpinan dalam partai tersebut secara horizontal, pusat perhatian partai

¹. <http://robbani.wordpress.com/2007/08/01/4/>

adalah pada mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta kecintaan kepada bangsa. Secara tidak langsung, perhatian Partai Demokrat lebih mementingkan persatuan untuk menjaga keutuhan dan kemajuan NKRI dan meletakkan kepentingan umum atau bangsa secara keseluruhan di atas kepentingan individu, kelompok, dan golongan tertentu. Jika yang menjadi prioritas merupakan kepentingan umum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak akan terjadi diskriminasi terhadap golongan manapun.

Partai Demokrat dalam memilih pimpinan partainya, baik tingkat daerah, regional, maupun nasional adalah melalui mekanisme musyawarah yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Ada beberapa tingkatan dalam menentukan kekuasaannya, seperti yang tercantum dalam BAB VIII Pasal 21. yang diantaranya;

1. Kongres.
2. Kongres Luar Biasa.
3. Musyawarah Daerah.
4. Musyawarah Daerah Luar Biasa.
5. Musyawarah Cabang.
6. Musyawarah Cabang Luar Biasa,
7. Musyawarah Anak Cabang.
8. Musyawarah Ranting.²

Memekanisme kekuasaan seperti di atas, merupakan cara yang demokratis, dalam artian penentuan kebijakan diputuskan melalui mekanisme musyawarah, dan hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an:

².http://www.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=8

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران: 159).

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkal Allah kepada Allah" (al -Imran: 159).³

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, secara vertikal, dalam membangun manusia, masyarakat dan Bangsa Indonesia dilandasi oleh semangat keagamaan, yakni beriman kepada Tuhan Sang Pencipta dan menyebarkan kasih sayang Tuhan di muka bumi. Kebebasan keanggotaan Partai Demokrat, meniscayakan keragaman pemeluk agama di dalamnya. Sesuai dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, secara substantif, kepemimpinan di dalam Partai Demokrat selalu berlandaskan pada ajaran-ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut oleh anggotanya. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa, tidak ada paksaan di dalam partai demokrat untuk mengikuti aturan suatu agama tertentu, akan tetapi lebih ditekankan untuk melandaskan semua tindakan anggotanya pada nilai-nilai agama yang di anutnya.

Sebagai wujud dari semangat nasionalisme, keanggotaan Partai Demokrat terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki komitmen NKRI dan memiliki komitmen untuk membangun masa depan bangsa. Semua warga negara berhak untuk memperoleh perhatian dari partai dan berhak untuk bergabung di

³. DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 214

sebuah pemikiran yang sangat mendalam, karena beribu-ribu titik keberagaman harus diekstraksikan ke dalam sebuah rumusan ideologi. Sehingga siapapun pemimpin yang lahir pada saat perumusan itu akan belajar banyak untuk berinteraksi dengan banyak sudut pandang serta membangun titik temu.

Trilogi Perjuangan yang dijadikan idealisme Partai Demokrat, yaitu Demokrasi, Kesejahteraan dan Keamanan, Merupakan strategi perjuangan yang sinergis melihat kondisi bangsa. Sesuai dengan tuntutan zaman di tengah dunia global, Demokrasi, Kesejahteraan, dan Keamanan merupakan tiga hal yang secara sinergis harus selalu diperjuangkan. Perjuangan demokrasi adalah upaya sebesar-besarnya menghargai aspirasi-aspirasi rakyat yang dengan itu mereka memperoleh peluang yang luas untuk menyalurkan aspirasi dan berkontribusi dan selanjutnya memperoleh jaminan untuk menikmati hasil perjuangan secara profesional. Demokrasi bukan tujuan perjuangan, tetapi alat dan cara berjuang. Seperti halnya musyawarah, demokrasi bisa dijadikan metodologi dalam pengambilan sebuah kebijakan yang populis.

Harus disadari, bagi seorang pemimpin, menghargai aspirasi rakyatnya merupakan suatu keharusan. Kebijakan-kebijakan pemimpin atau pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, karena pada hakekatnya kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin atau penguasa harus hasil dari kesepakatan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan seperti di Indonesia dengan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengakomodir aspirasi rakyat, karena sistem

itulah yang dipandang lebih efektif di negara yang secara kuantitas penduduknya sangat banyak.

B. Kepemimpinan Dalam Partai Demokrat Perspektif Politik Islam .

Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Islam . Islam telah melekat menjadi suatu hal yang mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan rakyat di Indonesia. Bahkan, Pancasila sendiri merupakan suatu ideologi yang berusaha mempertemukan prinsip Islam dengan perjuangan persatuan Indonesia pada saat perumusannya. Terlepas dari perdebatan dalam banyak literatur sejarah tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia, pada saat ini Islam telah menjadi agama yang berinteraksi dengan berbagai kebudayaan daerah. Sejarah Wali Songo yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa dan sekitarnya semakin memperjelas bahwa Islam dan kepemimpinannya mampu berakulturasi dengan berbagai budaya secara santun. Proses akulturasi antara Islam sebagai agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan dengan budaya di Indonesia saat awal kedatangannya membuat Islam menjadi agama yang mampu diterima dengan mudah di Indonesia. Bahkan saat ini Indonesia masih bertahan sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.⁵

Partai Demokrat seperti dijabarkan dalam wawasan Nasionalisme, Pluralisme dan Humanisme merupakan rumusan ide yang menyeimbangkan

⁵. <http://ressay.wordpress.com/2007/07/28/kepemimpinan-dalam-masyarakat-Islam/#comment-7263>

akan tetapi seperti yang pernah dikatakan Hasan al-Banna, seorang tokoh pergerakan Islam, memaparkan bahwa apabila yang dimaksud dengan nasionalisme adalah kerinduan atau keberpihakan terhadap tanah air, keharusan berjuang membebaskan tanah air dari penjajahan, ikatan kekeluargaan antar masyarakat, dan pembebasan negeri-negeri lain maka nasionalisme dalam makna demikian dapat diterima dan bahkan dalam kondisi tertentu dianggap sebagai kewajiban.⁶

Secara sosio kultur, masyarakat Indonesia ada kesamaan dengan masyarakat Madi>nah yang dipimpin oleh Rasululla>h. Indonesia termasuk negara yang penduduknya sangat plural, yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam agama, budaya, suku, dan golongan. Hal itu juga terjadi pada penduduk Madi>nah, dimana penduduknya terdiri dari beragam agama, budaya, suku, ras. Dari fakta sejarah keragaman tersebut, telah lahir solidaritas nasional menghadapi penjajahan hingga lahirnya NKRI. Manajemen keragaman itu dimungkinkan karena adanya semangat Bhineka Tunggal Ika, yakni meski ada identitas yang berbeda-beda tetapi pada hakikatnya adalah satu kesatuan, yaitu kesatuan bangsa Indonesia. Tugas memanej keragaman tersebut bukan dengan cara menyeragamkan yang beragam, akan tetapi lebih pada menyatukan visi dari kekuatan yang beragam menjadi satu kekuatan, yaitu kekuatan NKRI. Pluralitas suku, ras, agama dan budaya merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat kita

⁶. <http://robbani.wordpress.com/2007/08/01/4/>

sangkal keberadaannya, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal dalam firman Allah dalam al-Qur'a>n:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا، أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ (يونس : 99).

"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya" (Yunus: 99).⁷

Perbedaan identitas yang terjadi di negara Indonesia tergambar dalam ayat di atas. Bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita agar orang lain mengikuti apa yang kita yakini. Dalam hubungan antar manusia, Partai Demokrat mengakui dan menghormati adanya berbagai solidaritas, seperti solidaritas keagamaan, solidaritas nasional dan solidaritas kemanusiaan. Sesuai dengan sifatnya, keanggotaan partai Demokrat terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia. Dari sifatnya yang bebas tersebut, menjadi konsekwensi pada beragamnya keanggotaan parpol tersebut. Dari perbedan agama, budaya dan semacamnya tersebut dibutuhkan mamajemen sehingga mampu membangun sikap toleran, dari siakp dewasa memaknai perbedaan akan melahirkan kekuatan nasional. Allah SWT. Befirman:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المتحنة : 8).

⁷. DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 400

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil" (al-Mumtahanah: 08).⁸

Ayat di atas memberikan pesan bahwa di dalam Islam tidak ada larangan menjalin hubungan baik dengan seseorang atau golongan yang tidak seiman dengan kita. Bahkan Allah memerintahkan, agar kita berlaku adil kepada siapapun tanpa melihat latar belakang agama dan perbedaan yang lain.

Sebagai bangsa yang diakui kedaulatannya, bangsa Indonesia juga harus menentang setiap penindasan hak azazi manusia yang terjadi dibelahan dunia manapun, sebagai wujud solidaritas kemanusiaan. Itulah yang dimaksud Humanisme dalam Partai Demokrat.⁹ Sejalan dengan ajaran Islam bahwa makhluk yang dimuliakan oleh Allah yang oleh karena itu manusia berkewajiban memelihara kemuliaan dirinya. Wujud perjuangan pemuliaan diri manusia adalah perlindungan hak-hak azazi manusia. Agama mengajarkan perlindungan manusia untuk memperoleh hak-haknya, yakni perlindungan fisik dari penganiayaan, perlindungan nyawa dari pembunuhan, perlindungan akal dari penindasan intelektual, perlindungan harta dari kepemilikannya serta perlindungan jati diri dari kesucian nasabnya (keturunannya). Ajaran inilah yang menjelma menjadi HAM dalam budaya modern.

⁸. *Ibid*, h. 1120

⁹. http://www.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=8

Partai Demokrat memiliki misi memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus proklamasi kemerdekaan berdirinya NKRI dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.

Terkait dengan persoalan kepemimpinan sosial dan politik, dalam Islam tidak ditemukan konsep yang baku. Dalam Islam hanya terdapat prinsip-prinsip dalam hidup bermasyarakat dalam sebuah negara. Memang ada sebagian orang Islam yang berpendapat bahwa, kepemimpinan Nabi Muhammad waktu memimpin negara Madinah dianggap bentuk negara Islam, akan tetapi, pernyataan itu tidak mempunyai dasar yang kuat, baik landasan nas al-Qur'an maupun hadisnya. Prinsip-prinsip berpolitik dalam Islam dapat kita ambil dari asas seperti; asas musyawarah, adalah, musawa dalam al-Qur'an sudah dijelaskan:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشورى: 38).

*"Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka". (al-Syura: 38).*¹⁰

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa, musyawarah dapat dijadikan kerangka metodologis guna mencapai hasil mufakat, melalui musyawarah atau

¹⁰. DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 968

dialog politik, kekuasaan absolut dan totaliter dapat dihindari.¹¹ Dan itu yang sering dianggap sebagai sinonim dari kata demokrasi.

Secara diskriptif-kronologis, kesejahteraan, keamanan, dan rasa keadilan, merupakan akibat dari kebijakan pemerintah yang tepat dan proporsional. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan, keamanan dan problem-problem sosial lainnya banyak dipengaruhi oleh pemimpinnya. Kalau pemimpinnya dalam menjalankan kepemimpinannya memakai model otoriter, maka rakyat hanya bisa pasrah, semua kebijakan tergantung pada pemimpinnya. Islam menolak model kepemimpinan yang sewenang-wenang itu, seperti firman Allah:

وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. (يونس: 83).

*Sungguh Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. (Yunus: 83).*¹²

Sikap otoriter bagi pemimpin tidak dibenarkan dengan ajaran Islam.¹³ Oleh sebab itu, Rasulullah SAW. Selama memimpin ummatnya dan menjadi pemimpin di negara Madinah selalu mengajarkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, dengan berlandaskan pada ayat:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران: 159).

*“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah” (Ali Imran: 159).*¹⁴

¹¹. Abegebriel Maftuh A., Abeveiro Yani A., Team SR-Ins, *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia*, h. 12

¹². DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 400

¹³. M. Dalyono., *Kepemimpinan Menurut Islam*, h. 166

¹⁴. DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 214

Islam hadir untuk menjawab problem sosial masyarakat, dimana pada waktu itu kehidupan masyarakat Makkah sudah dipandang tidak manusiawi, seperti terjadi eksploitasi orang, yang kuat menindas yang lemah dan sebagainya. Dengan latar belakang itu kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan etika hidup masyarakat setempat.

Akhlak sangat dibutuhkan, baik dalam artian vertikal maupun horizontal. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai pendiri partai Demokrat sekaligus Presiden keenam di Indonesia berpendapat, bahwa yang penting dalam politik adalah akhlak. Politik yang berakhlak berarti melakukan segala sesuatu dengan tujuan baik, dan dengan hati yang bersih. Kalau pemimpin sudah kehilangan akhlak, maka ia akan buta dalam membuat keputusan. Ia akan cenderung mengambil keputusan yang keliru dan tidak bermoral. Seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan tidak berarti harus kehilangan rasa kesatuannya, tenggang rasa, menghormati orang lain atau toleran, dan menahan ucapan yang tidak baik juga cerminan dari akhlak. Menurut Kurdi Mustofa, staf khusus Presiden SBY yang lama mengikuti Presiden, mengatakan bahwa sumber dari akhlak SBY adalah latar belakang Islam nya. Dia mengatakan bahwa SBY lahir dilingkungan pesantren, sehingga beliau sangat akrab dengan Syari'at, nilai dan hakekat keIslam an.¹⁵

¹⁵. Dino Patti Djalal, *Harus Bisa; Seni memimpin Ala SBY*, h. 185

Seorang pemimpin harus memiliki akhlak yang baik. Pendapat di atas korelatif dengan hadis nabi yang menegaskan bahwa diutusny nabi Muhammad kemuka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan memanusiakan manusia.

Disamping harus memiliki akhlak yang baik, seorang pemimpin harus memiliki ketegasan untuk menentukan kebijakan dengan berbagai resikoanya. Ketegasan dalam ajaran Islam itu diharuskan, dalam artian, seorang pemimpin harus memberikan keputusan mana yang *hak dan mana yang batil*, ketegasan tersebut juga harus sejalan dengan hukum yang berlaku, karena di dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, yang menjadi panglima adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu, mentaati Pancasila sebagai falsafah negara dan tertib hukum tertinggi bagi warga negara Indonesia merupakan suatu yang final.

Hanya saja "Ketegasan" dan "Keberanian" bagi seorang pemimpin tidak serta merta menafikan makna toleransi terhadap realitas keragaman bangsa. Karena yang harus kita sadari bahwa, keragaman Indonesia dari aspek sosial dan budaya merupakan realitas yang harus kita terima. Perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Toleransi keberagaman, kebudayaan, kebahasaan, dan kesukuan adalah tuntutan yang harus tetap di pelihara dan di junjung tinggi oleh seorang pemimpin bangsa ini. Toleransi dalam hal ini dapat di realisasikan dalam bentuk saling menghormati satu sama lain, menghindari *truth claim* (pembenaran diri), apalagi diskriminatif terhadap minoritas.

Ketika Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, kemajmukan agama dan suku itu sudah lama ada, dan diakui keberadaannya. Maka dalam Islam ada penyebutan kelompok *Ahlul Kitab*, kaum *Musyriki>n*, dan kaum *Muslimi>n*. Pengakuan akan keberadaan berbagai kelompok masyarakat menunjukkan pengakuan bahwa, pluralisme adalah keniscayaan sejarah manusia. Pengakuan kemajmukan masyarakat menurut Islam tertuang dalam firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة: 256).

“Tidak ada paksaan untuk memeluk agama.” (*al-Baqarah: 256*).¹⁶

Merujuk pada pembahasan pada bab sebelumnya, terkait kasus kekerasan terhadap kelompok yang berbeda pandangan atau kepercayaan adalah salah satu bentuk intoleransi dan perilaku seperti itu sangat jelas dilarang dalam Islam . Sesuai dengan statmen Anas Urbaningrum (Ketua DPP Partai Demokrat), terkait kasus kekerasan di Monas pada hari minggu, 01 Juni 2008, yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap sekelompok massa yang menamakan diri sebagai *Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan* (AKKBB). adalah bentuk nyata dari ketidakdewasaan menyikapi perbedaan dan dinilai tidak toleran, kekerasan karena perbedaan adalah ancaman bagi masa depan Indonesia yang majemuk dan hal semacam ini tidak boleh dibiarkan, karena kalau ini dibiarkan, akan merusak semangat kita ber-Bhinneka Tunggal Ika. Apapun alasannya, tidak boleh ada warga negara yang melakukan kekerasan

¹⁶. DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 77

atau melanggar hak sipil orang lain. FPI memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, tetapi tidak berhak melakukan kekerasan terhadap kelompok lain. Jalur kekerasan yang ditempuh FPI, dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai Islam.¹⁷ Dia menilai bahwa Islam sangat menghargai perbedaan. Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'a>n:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا، أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ (يونس : 99).

*"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya" (Yunus: 99).*¹⁸

Ayat di atas memberikan pesan, bahwa keragaman ideologi yang ada merupakan *sunnatullah* yang tidak mungkin diseragamkan hanya atas kehendak manusia. Justru pluralitas agama, sosial, budaya adalah sebuah rahmat yang harus kita cari hikmahnya.

Dengan menghormati keragaman dan perbedaan pandangan, maka sinergisitas dialog dengan berbagai bentuknya kita mampu melanjutkan misi Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam dan bukannya permusuhan apalagi laknat.

Kalau kita kembali pada fitrah kita sebagai manusia, maka yang harus kita sadari adalah, bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT (*Syari>'ah*), Hukum Negara, Serta adat-

¹⁷. <http://www.antara.co.id/arc/2008/6/1/partai-demokrat-kritik-kekerasan-fpi/>

¹⁸. DEPAG RI, *al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 400

istiadat yang telah menjadi kesepakatan umum di lingkungan sosial kita. Seperti, ajaran agama, aturan-aturan pemerintah dan hukum adat yang berlaku di lingkungan kita, itu yang namanya akhlak hidup. Salah satu yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin adalah akhlak hidup yang baik, dan peka terhadap problem masyarakatnya sesuai dengan adat yang berlaku.¹⁹

Sebagai Muslim, kita harus selalu berpegang teguh pada kitab suci; al-Qur'a>n dan Hadith. Sesuai dengan hakikat penciptaan manusia sebagai *khali>fah fi al ard*, bahwa hidup di dunia ini merupakan perjuangan melestarikan alam yang diamanatkan Allah swt. Perjuangan untuk kebaikan merupakan ibadah, itu sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur'a>n, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah. Ibadah itu jangan hanya dipahami dengan berbentuk ritual-ritual saja, misalkan s}alat, puasa dan sebagainya. Akan tetapi, bisa berbentuk ibadah sosial, seperti tolong menolong sesama makhluk sosial dalam kebaikan.

Secara kuantitas Muslim merupakan mayoritas di Negara Indonesia, akan tetapi, kita tidak boleh diskriminatif terhadap non-Muslim. Selama mereka tidak memerangi atau mengganggu kehidupan kita, kita tidak dibenarkan mengganggu mereka. Bahkan nabi Muhammad pernah bersabda; barang siapa menyakiti kafir dhimmi,²⁰ maka orang tersebut seperti menyakiti saya.²¹

¹⁹. Achmad Syafi'I, *Wawancara*. Di Rumah kontrakannya yang sekaligus Posko pemenangan Caleg DPR RI partai Demokrat, Jl. Asam Manis Pamekasan, tanggal, 10 Januari, 2009 Pukul. 19. 30 WIB.

²⁰. Orang non-Islam yang ada di negara Islam dan memilih berdamai dengan orang Islam .

Kepemimpinan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Islam . Islam telah melekat menjadi suatu hal yang mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan rakyat di Indonesia. Bahkan Pancasila sendiri merupakan suatu ideologi yang berusaha mempertemukan prinsip Islam dengan perjuangan persatuan Indonesia pada saat perumusannya. Terlepas dari perdebatan dalam banyak literatur sejarah tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia, pada saat ini Islam telah menjadi agama yang berinteraksi dengan berbagai kebudayaan daerah. Sejarah Wali Songo misalkan, yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa dan sekitarnya semakin memperjelas bahwa Islam dan kepemimpinannya mampu berakulturasi dengan berbagai budaya secara santun. Proses akulturasi antara Islam sebagai agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan dengan budaya di Indonesia saat awal kedatangannya membuat Islam menjadi agama yang mampu diterima dengan mudah di Indonesia. Bahkan saat ini Indonesia masih bertahan sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dapat disimpulkan, dengan akhlak yang sesuai dengan semangat lokal dan semangat kekinian, maka misi Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil alami* akan terlaksana.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Harus disadari, bahwa demokrasi disuatu negara manapun harus benar-benar sesuai dengan sosio kultur negara setempat. Seperti demokrasi yang dianut negara Indonesia, tidak boleh mengikuti demokrasi yang dianut oleh negara-

²¹. Sugiharto, *Wawancara*. Di kediamannya Sidoseremo Surabaya, pada tanggal 27 Januari 2009, Pukul: 22. 00.

